PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA NANGA UNGAI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG

Susi Krisjuyani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: susicrisjuyani@gmail.com

Abstract: *Village development is the key to creating equal distribution of prosperity, reducing poverty, and supporting sustainable development. In Nanga Ungai Village, Village Development Planning has not been carried out optimally by the Village government, this occurs due to a lack of community participation in planning, a lack of village government capacity in preparing plans, budget limitations, and unclear development priorities. Based on this problem, the author is interested in answering this problem by trying to answer the problem formulation: How is Village Development Planning in Nanga Ungai Village, Kayan Hulu District, Sintang Regency? The aim of this research is to create a systematic, factual and accurate description, picture or painting of the facts or phenomena being investigated. So the method used is a qualitative descriptive research method. The object of this research is Village Development Planning in Nanga Ungai Village, Kayan Hulu District, Sintang Regency. There were 4 informants for this research, as a consideration that those selected met the criteria according to the research objectives. The results of the research show that Village Development Planning in Nanga Ungai Village is quite good, deliberations are carried out first, mapping of problems and objectives of activities, determining activity implementers, preparing work plans, and socializing activities. Village Development is funded by the Village Revenue and Expenditure Budget. Village Deliberation participants, namely the village government, Village Consultative Body, Village Community Institutions, and elements of village society, are funded by the APBDes.*

Keywords: *Planning; Development; Village.*

Abstrak: Pembangunan Desa adalah kunci untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di Desa Nanga Ungai, Perencanaan Pembangunan Desa belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Desa, hal itu terjadi dikarenakan kurangnya partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, kurangnya kapasitas pemerintah desa dalam Menyusun rencana, keterbatasan anggaran, dan ketidakjelasan prioritas Pembangunan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik menjawab persoalan tersebut dengan mencoba menjawab rumusan masalah: Bagaimana Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta atau fenomena yang diselidiki. Maka metode yang digunakan, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Informan penelitian ini sebanyak 4 orang, sebagai pertimbangan bahwa yang dipilih memenuhi kriteria sesuai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Nanga Ungai sudah cukup baik, dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu, pemetaan masalah dan tujuan kegiatan, penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, dan sosialisasi kegiatan. Pembangunan Desa didanai oleh Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa. Peserta Musyawarah Desa, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat desa, di biayai oleh APBDes.

Kata Kunci: Perencanaan; Pembangunan; Desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah kunci keberhasilan pada penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali desa. Pembangunan di desa merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan fokus yang tepat, desa dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Pembangunan pada dasarnya diarahkan kepada perbaikan kondisi yang lebih baik atau lebih bernilai agar memberikan manfaat pada masyarakat desa sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara

terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. selanjutnya, menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan.

Sebelum melaksanakan Pembangunan desa, terlebih dahulu desa harus melaksanakan perencanaan pembangunan melalui musyawarah. Dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa harus mengutamakan skala prioritas, program, kebutuhan, kegiatan, dan tujuan pembangunan suatu desa yang didanai oleh Anggaran Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) daerah setempat berdasarkan pengajuan kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam pasal 78 pada ayat (2) menyebutkan bahwa "Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan". Berdasarkan tahapan tersebut maka penting untuk membuat perencanaan sebelum melaksanakan Pembangunan di desa.

Menurut Pislawati Alfiaturrahman (2016:256) Perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa depan.

Perencanaan merupakan kegiatan dari pembangunan yang paling utama, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Perencanaan digunakan untuk membuat segala kegiatan dalam suatu program atau kegiatan dapat tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga tujuan dapat tercapai.

Menurut Sarina dan Mardalena (2017:37) perencanaan adalah cara berfikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan di desa. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Menurut Listyaningsih (2014:90) Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan Pembangunan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menentukan tujuan, strategi, dan

langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Menurut Listyaningsih (2014:92-93) Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuantujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Dalam Perencanaan Pembangunan juga harus melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Perencanaan Pembangunan yang dimiliki oleh desa merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan di tingkat desa secara partisipatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan Pembangunan desa terbagi menjadi dua jenis perencanaan

Pembangunan, yaitu perencanaan lima tahunan desa dan perencanaan satu tahunan desa. Perencanaan lima tahunan desa dilaksanakan dalam forum Musrenbang RPJM Desa dengan dokumen yang dihasilkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan satu tahunan desa dilaksanakan dalam forum Musrenbang Desa, dokumen yang dihasilkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), ditetapkan melalui SK Kepala Desa.

Di Desa Nanga Ungai, Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui berbagai proses. Dimulai dari musyawarah di tingkat Dusun hingga musyawarah Desa yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam Proses perencanaan tersebut, diketahui Masyarakat Desa bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merumuskan Pembangunan yang menjadi rencana kegiatan di desa, baik dalam waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun.

Kondisi yang terjadi di Desa Nanga Ungai menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa memiliki jangka waktu, hal tersebut sama halnya dengan yang telah disampaikan oleh Amirullah. Menurut Amirullah (2015:66) Perencanaan dapat diklasifikasikan menurut luasnya, jangka waktu, dan frekuensi penggunaannya.

Perencanaan memberikan manfaat yang baik bagi Desa, dengan

Perencanaan membantu menentukan apa yang ini dicapai sesuai dengan kebutuhan. Menurut Adisaputro (2014:72) Perencanaan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Perencanaan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terkoordinasi.
2. Perencanaan sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian, dengan adanya perencanaan, perubahan yang mungkin terjadi bisa diantisipasi dengan baik.
3. Perencanaan sebagai alat untuk menghemat sumber daya dan meningkatkan efisiensi organisasi.
4. Perencanaan sebagai alat standarisasi dalam pengawasan dan evaluasi.

Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, di Desa Nanga Ungai masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa, hal ini dikarenakan regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan Pembangunan desa harus mengutamakan Pembangunan berdasarkan kepada prioritas yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2023 diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Pemerintah Desa juga harus membuat perencanaan Pembangunan berdasarkan pada kebutuhan Masyarakat Desa. Kebutuhan

Masyarakat desa telah disampaikan pada musyawarah, baik musyawarah di tingkat Dusun maupun di tingkat Desa.

Seperti di ketahui, Desa Nanga Ungai merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kayan Hulu dengan akses ke Desa menggunakan jalur darat dan jalur Sungai. Dimana jalur darat memiliki medan yang cukup ekstrim, dan masih tanah kuning belum di beton apalagi di aspal. Jika hujan maka aksesnya akan sangat sulit untuk dilewati, tetapi walaupun demikian, Masyarakat bisa menggunakan akses jalur Sungai, yaitu Sungai Tebidah. S

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu gambaran suatu kelompok masyarakat, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun peristiwa dari masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.

Dalam mengumpulkan data dan informasi, penulis melakukan observasi, wawancara dengan informan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat Desa, membuat dokumentasi serta melakukan analisis data terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, berkaitan

dengan “Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa sangatlah penting dilakukan sebagai dasar atau panduan guna menentukan tindakan-tindakan apa yang dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Desa yang baik sesuai kebutuhan Masyarakat desa, terkhusus Pembangunan di Desa Nanga Ungai.

Kepala Desa Nanga Ungai mengatakan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Desa dibuat melalui berbagai proses, mulai dari musyawarah tingkat Dusun sampai kepada musyawarah Pembangunan desa. Pada musyawarah tersebut pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh unsur Masyarakat akan melakukan berbagai kegiatan, yaitu penetapan kegiatan, menyusun rencana kerja, menetapkan prosedur serta program pembangunan.

Apabila prosedur tersebut dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan suatu program pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja.

Sekretaris Desa Nanga Ungai menyampaikan bahwa Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan harus memperhatikan APBDes yang diperoleh oleh desa. APBDes ini adalah sumber-

sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun, terdiri atas pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APBDes disusun sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa serta berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mengetahui APBDes yang telah diperoleh dan ditetapkan di Desa Nanga Ungai, pemerintah Desa wajib memberikan sosialisasi APBDes kepada Masyarakat, sosialisasi ini bisa melalui papan informasi atau musyawarah desa. Dengan melaksanakan sosialisasi APBDes diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat desa mengenai rincian APBDes yang Desa miliki, termasuk sumber pendapatan dan alokasi belanja untuk apa saja.

Dengan APBDes maka pemerintah Desa juga dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, pemerintah desa juga dapat memastikan kegiatan sesuai dengan skala prioritas Pembangunan desa, dan melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, terutama program yang bersifat padat karya.

APBDes menjadi penting karena dengan APBDes Pemerintah Desa dapat melakukan pengelolaan dan Administrasi keuangan Desa dengan transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku, melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan desa yang tertib dan rapi sehingga

memudahkan saat dilaksanakan audit oleh pemerintah supra desa.

Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nanga Ungai Tahun 2023.

No.	Bidang	Jenis	Jumlah Anggaran
1	Pendapatan		Rp 1.118.476.664
	a.	Dana Desa	Rp 830.580.000
	b.	Alokasi Dana Desa	Rp 265.831.848
	c.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 12.464.816
	d.	SILPA Tahun Lalu	Rp 9.600.000
2	Belanja		Rp 1.108.876.664
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	SILTAP, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp 320.976.664
		Pengelolaan Administrasi Desa	Rp 28.254.500
		Pengelolaan Tata Praja Pemerintahan	Rp 78.359.980
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	Rp 42.152.000
		Sub Bidang Kesehatan	Rp 39.600.000
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 390.772.040
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 48.970.000
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 405.000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Rp 18.000.000
		Kepemudaan dan Olahraga	Rp 16.690.000
		Kelembagaan Masyarakat	Rp 11.366.480
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Peternakan	Rp 14.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp 7.930.000	

dan Mendesak Desa	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 86.400.000
Pembiayaan	Penyertaan Modal	Rp 5.000.000

Sumber Data: Desa Nanga Ungai Tahun 2023.

Data APBDes Nanga Ungai di atas menunjukkan bahwa keuangan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Nanga Ungai sebesar Rp. 1.118.476.664. Dengan memperoleh keuangan Desa yang cukup besar, tentulah pemerintah desa harus melakukan Perencanaan Pembangunan Desa dengan baik, demi terwujudnya aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan dan prioritas pengelolaan keuangan desa.

Dari total keuangan desa yang diperoleh oleh Desa Nanga Ungai hanya sebesar Rp. 521.899.040 untuk pelaksanaan Pembangunan Desa, maka dari itu Pemerintah Desa harus melaksanakan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2. Perencanaan Pembangunan di Desa Nanga Ungai Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran
1.	Renovasi Gedung PAUD	Rp.42.152.000
2.	Pengadaan tempat sampah	39.600.000
3.	Pembangunan Jalan Tani	150.000.000
4.	Pembangunan Jalan Utama Desa	240.772.040
5.	Komunikasi dan Informatika	405.000
6.	Pemeliharaan Jalan Pemukiman Warga	48.970.000

Sumber Data: Desa Nanga Ungai Tahun 2023.

Data Perencanaan Pembangunan di atas merupakan hasil dari musyawarah desa dan merupakan bentuk aspirasi yang sudah Masyarakat desa usulkan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Nanga Ungai bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Desa aspirasi masyarakat menjadi sangat penting. Karena dengan aspirasi tersebut dapat diketahui kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi prioritas masyarakat di desa tentulah harus masuk dalam perencanaan pembangunan di desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan desa. Dengan Musyawarah maka dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat, menjamin transparansi dan akuntabilitas serta menentukan prioritas Pembangunan. Musyawarah juga penting dilaksanakan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, memastikan kesesuaian rencana Pembangunan dengan kebijakan.

Unsur Masyarakat Desa Nanga Ungai mengatakan bahwa Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Tetapi di desa Nanga Ungai masih ada masyarakat yang tidak terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, hal ini terjadi dikarenakan hanya beberapa unsur masyarakat saja yang terlibat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah di desa. Ini mengakibatkan tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat tersampaikan

dengan baik, tetapi dalam musyawarah tersebut yang disampaikan rencana pembangunan yang mencakup kebutuhan seluruh masyarakat.

Dalam arti rencana pembangunan yang masuk ke desa berdasar atas aspirasi dari masyarakat bukan berdasar atas kepentingan perorangan dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 80 yang menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Musyawarah ini dilaksanakan di Tingkat Dusun terlebih dahulu kemudian di Tingkat desa, yang sering disebut sebagai musyawarah perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa. Musyawarah desa ini dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur Masyarakat. Keterlibatan ketiga unsur tersebut demi menciptakan perencanaan Pembangunan yang terencana dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Desa.

Tentang keterlibatan dalam musyawarah desa ini juga di atur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 54 yang menyebutkan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling

kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sendiri dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu musyawarah perencanaan Pembangunan untuk masa waktu 5 (lima) tahun atau sering disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam jangka waktu kegiatan 1 (satu) tahun.

Musyawarah desa tersebut dilaksanakan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi:

- a. Penataan desa;
- b. Perencanaan desa;
- c. Kerja sama desa;
- d. Rencana investasi yang masuk ke desa;
- e. Pembentukan BUMDes;
- f. Penambahan dan pelepasan aset desa; dan
- g. Kejadian luar biasa.

Keterlibatan Masyarakat pada musyawarah desa dalam perencanaan Pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat. Di Desa Nanga Ungai sendiri, walaupun masyarakat telah menyampaikan aspirasinya pada saat musyawarah desa berlangsung, pemerintah desa akan tetap mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai

dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Selain prioritas yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan tersebut di atas, bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa masih tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Maka dari itu, perencanaan sangat penting dilakukan, supaya dapat mengetahui kegiatan apa yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam musyawarah dan prioritas Pembangunan yang sudah menjadi ketentuan peraturan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nanga Ungai mengatakan bahwa musyawarah dalam perencanaan Pembangunan sangat penting, dengan dilaksanakannya musyawarah maka Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Dengan harapan aspirasi yang disampaikan dapat menentukan harapan dan keberhasilan pembangunan desa. Selain masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung dalam musyawarah, BPD juga bisa menyampaikan aspirasinya. BPD menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat di tingkat desa untuk menyampaikan aspirasi tentang perencanaan Pembangunan yang ada di Desa.

Seperti diketahui BPD adalah mitra kerja dari pemerintah desa, memiliki fungsi menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat Desa dan berhak menyatakan pendapat atau usul dan mengajukan pertanyaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Seperti tertuang dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya telah diubah menjadi undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam pasal 55, yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya dalam pasal 62 yang menyebutkan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam perencanaan Pembangunan desa, yaitu sebagai Lembaga yang mewakili aspirasi Masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah desa. BPD menjadi jembatan antara Masyarakat dan Pemerintah Desa, mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan warga desa terkait Pembangunan desa dan mengumpulkan usulan Masyarakat dalam musyawarah desa agar bisa

dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

BPD juga memastikan kebijakan Pembangunan selaras dengan kebutuhan Masyarakat dan peraturan yang lebih tinggi, mengawasi kinerja pemerintah desa agar Pembangunan desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan memastikan penggunaan APBDDes sesuai dengan prioritas Pembangunan dan transparan.

Selain itu, di Desa Nanga Ungai, BPD selalu mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan Pembangunan, mengajak Masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan Pembangunan desa. BPD juga menjamin bahwa Keputusan Pembangunan desa tidak hanya dibuat oleh pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat desa.

Dengan peran tersebut di atas, membuktikan bahwa di Desa Nanga Ungai BPD memastikan Perencanaan Pembangunan desa bersifat partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas bahwa Perencanaan Pembangunan Desa merupakan elemen strategis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat Desa. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa melalui pendekatan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam prosesnya, perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis, meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai panduan tahunan.

Partisipasi aktif masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan, karena mampu menggali kebutuhan dan potensi lokal desa secara keseluruhan dan lebih mendalam. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mendorong implementasi program pembangunan yang relevan dan tepat sasaran.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia di desa, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta kendala dalam pengelolaan dana desa yang memengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah desa, penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Secara keseluruhan, perencanaan pembangunan desa yang efektif tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam

mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Desa (SID) dapat membantu pengumpulan dan analisis data secara lebih efisien.
2. Perencanaan desa perlu diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), sehingga program-program yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
3. Perencanaan pembangunan harus menggali dan mengoptimalkan potensi lokal, seperti sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal, untuk meningkatkan daya saing desa dan menciptakan ekonomi yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, 2014. Manajemen Pemasaran, Analisis untuk Perencanaan Strategi Pemasaran. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Alfiaturrahman, Pislawati. 2016. Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Jurnal

Valuta Vol 2 No 2, ISSN: 2502-1419
Hal 251-267

- Amirullah. 2015." Pengantar Manajemen". Mitra wacana media; Jakarta
- Listyaningsih, 2014. Administrasi Pembangunan, Graha ilmu: Yogyakarta.
- Sarinah, dan Mardalena. 2017. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.